

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2020 akan selamanya dikenang sebagai awal dari sebuah dekade yang diwarnai oleh peristiwa luar biasa yakni Pandemi¹ Virus Corona atau Covid-19. Pandemi ini menghadirkan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi Covid-19 selain menjadi ujian bagi sistem kesehatan dunia dan menjadi sebuah pengingat yang kuat tentang pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi krisis yang melebihi batasan-batasan geografis dan politik. Mengingat pandemi ini menyebar dengan cepat melintasi batas-batas negara, ancaman lonjakan kasus Covid-19 akan tetap ada kecuali negara-negara yang dapat berkolaborasi dan melakukan kerja sama internasional. Para ahli epidemiologi² memperingatkan bahwa pandemi yang lebih buruk dapat melanda dunia kapan saja, sehingga semakin menekankan perlunya kerja sama internasional (Derviş, 2021). Pandemi ini telah menyampaikan pesan yang jelas yakni krisis internasional memerlukan tanggapan yang berskala internasional pula (OECD, 2020).

Tak satupun pemerintahan yang dapat menangani kasus pandemi ini secara sendirian. Hal tersebut memerlukan kerja sama yang mengharuskan adanya koordinasi, pemahaman, serta kesepakatan yang jelas mengenai peran dan tanggung

¹ wabah penyakit menular yang terjadi di wilayah geografis yang luas dengan prevalensi tinggi, yang menyerang sebagian besar populasi dunia, biasanya dalam beberapa bulan (Rogers, 2024)

² cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyebaran penyakit pada populasi manusia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Mullner, 2023)

jawab menanggulangi pandemi dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang (OECD, 2020). Namun, pada kenyataannya pemerintah nasional kurang efektif dalam penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, (1) kurangnya koordinasi antar tingkat pemerintahan menyebabkan inkonsistensi dalam tindakan tanggap darurat dan menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat; (2) kurangnya kesiapan dan persiapan pada awal pandemi mengakibatkan respons yang tidak efektif; (3) terbatasnya alokasi sumber daya dan infrastruktur layanan kesehatan sehingga membebani sistem layanan kesehatan serta menghambat upaya pengujian, pengobatan, dan vaksinasi yang efisien; (4) pertimbangan politik yang terkadang mengabaikan prioritas kesehatan masyarakat (OECD, 2022).

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan masalah yang signifikan bagi Indonesia. Kasus pertama Covid-19 dilaporkan di Jakarta pada bulan Maret 2020, kemudian virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia dalam waktu beberapa bulan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Indonesia kurang serius menanggapi Pandemi Covid-19. Negara-negara lain memberlakukan kebijakan *lockdown*³ sejak awal munculnya kasus Covid-19, namun Pemerintah Indonesia justru tidak memberlakukan kebijakan tersebut (DPR-RI, 2020). Pemerintah Indonesia juga memiliki kendala dalam penyampaian informasi serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan data kasus Covid-19. Pesan dan informasi yang diberikan oleh pemerintah cenderung mengurangi urgensi dan skala pandemi agar

³ Kebijakan lockdown adalah tindakan pemerintah untuk membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat dalam suatu wilayah dengan tujuan mengendalikan penyebaran virus, terutama pada masa pandemi Covid-19.

masyarakat tidak merasa panik dan tetap melanjutkan aktivitas ekonomi mereka. Akibatnya, persepsi risiko yang dirasakan oleh masyarakat menjadi sangat rendah sehingga tingkat kewaspadaan individu pun menurun. Tindakan tersebut justru menjadi bumerang lantaran kasus Covid-19 cepat menyebar di Indonesia sehingga menimbulkan kepanikan masal. Kegagalan dalam komunikasi dan koordinasi ini mengakibatkan kebingungan di kalangan masyarakat dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan situasi Pandemi Covid-19 (DA, 2020).

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Jawa Tengah, berupaya untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Sejak awal pandemi, jumlah infeksi Covid-19 di Jawa Tengah telah menjadi kekhawatiran besar. Dengan 5573 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi antara April 2020 dan Juli 2020, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak. (Andriyanto, 2020). Selama tahun 2020, Jawa Tengah melaporkan total kasus positif Covid-19 mencapai 48.385 orang (CNN Indonesia, 2020). Pada tahun 2022 angka kasus tersebut naik hingga 627.206 (Pemprov Jateng, 2022). Pandemi ini juga melumpuhkan sektor perekonomian Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai minus 2,65%. Akibatnya, angka pengangguran meningkat menjadi 6,48% dan angka kemiskinan naik menjadi 11,804% dari total penduduk Jawa Tengah (Humas Jateng, 2021).

Apa yang terjadi di Jawa Tengah memperlihatkan kurangnya peran pemerintah nasional menyebabkan pemerintah daerah juga mengalami kesulitan yang sama sehingga harus beradaptasi untuk menemukan solusi penanganan Pandemi Covid-19. Pemerintah daerah seperti Pemerintah Jawa Tengah mulai

bertindak secara mandiri demi menanggulangi kasus Covid-19 salah satunya adalah menerapkan kebijakan Jogo Tonggo⁴ (Prasetyo et al., 2022). Pemerintah Jawa Tengah juga mengupayakan Paradiplomasi dengan beberapa pihak luar negeri salah satunya adalah JICA (Japan International Cooperation Agency). Kerja sama ini melibatkan transfer teknologi dan dukungan logistik untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan di Jawa Tengah (Biro Pemotdaks, 2022). Selain itu, Pemerintah Jawa Tengah melakukan Paradiplomasi melalui kerja sama dengan mitra *Sister Province*-nya seperti Fujian, Chungcheongbuk-do, dan Queensland. Jawa Tengah berhasil mendapatkan beberapa bantuan alat medis seperti 3000 pcs baju hazmat, 2 mesin *airway positive Breathcare PAP*, 5 pcs *patient monitor*, 5 pcs *oxygen concentrator* dari Fujian serta bantuan 110.000 pcs masker KF94 dari Chungcheongbuk-do (Nugroho et al., 2023).

Sama seperti Jawa Tengah, daerah lain juga melakukan paradiplomasi seperti Jawa Barat dengan Sichuan, dan Sumatera Utara dengan Guangdong. Kedua daerah tersebut mendapatkan peralatan medis untuk membantu mengatasi kasus Pandemi Covid-19 seperti alat pelindung diri (APD), masker medis, dan sarung tangan medis (Kemlu RI, 2021). Akan tetapi, Kerjasama antara Jawa Tengah dan Queensland memiliki keunikan yang mana Queensland tidak memberi bantuan alat medis melainkan memberi bantuan sebesar Rp. 20 Milyar kepada Jawa Tengah serta bersedia melakukan pendampingan untuk pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Bantuan dana tersebut diberikan melalui kunjungan Duta Besar Australia untuk

⁴ Kebijakan yang mendukung kemandirian masyarakat Jawa Tengah dalam mencegah kasus Covid-19 di lingkungannya

Indonesia, Penny Williams PSM, saat berkunjung ke Kantor Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 14 Maret 2022 (Antoni, 2022). Selain itu pada September 2022 Pihak Jawa Tengah kembali menerima dana sebesar Rp 4.5 Milyar (Pemprov Jateng, 2022a).

Jawa Tengah dan Queensland kemudian bekerjasama membantu beberapa KUBE⁵ (Kelompok Usaha Bersama) di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah untuk mengurangi kemiskinan serta menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu Jawa Tengah dan Queensland juga menyediakan peralatan kesehatan penunjang vaksin Covid-19 serta memberikan ambulans air untuk masyarakat di daerah Karimunjawa. Pemberian multivitamin kepada para santri yang tersebar di beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah juga dilakukan demi menjaga kesehatan masyarakat. Jawa Tengah dan Queensland juga memberikan program pelatihan pada perempuan dan usaha kecil agar dapat pulih dan beradaptasi Pasca Covid-19 serta pemberian bantuan dana kepada kelompok rentan (Jawa Tengah, 2022).

Program bantuan ini memiliki dampak positif terutama dalam membantu mengatasi kemiskinan. Data dari BPS Jateng menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun sebesar 7578 penduduk dari tahun 2021 (BPS). Penyediaan ambulans air juga menjawab kebutuhan masyarakat di Karimunjawa yang kekurangan peralatan penunjang medis seperti USG (Fauziyah & Agriesta, 2023). Selain itu penanganan Covid-19 di Jawa Tengah semakin

⁵ Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga kurang mampu yang dibentuk, tumbuh dan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

membaik. Meskipun statistik Covid-19 di Jawa Tengah menyentuh angka 662.000 kasus namun total kasus sembuh mencapai 627.000 atau sekitar 94% (Andra Farm, 2024).

1.2. Rumusan Masalah

Setelah melihat program dari kerja sama Jawa Tengah dan Queensland, timbul sebuah pertanyaan : Mengapa Queensland bersedia memberikan bantuan dan pendampingan untuk Jawa Tengah? Bagaimana proses kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland dalam rangka pemulihan pasca Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland dalam rangka pemulihan pasca Covid-19.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland dalam rangka pemulihan pasca Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan sumbangsih ilmu akademik terhadap studi Hubungan Internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah di Indonesia mengenai kerja sama antar pemerintah daerah dalam menghadapi krisis global.

1.5. Kerangka Teoretis

Penelitian tentang kerja sama antara pemerintah daerah bukanlah sebuah hal baru dan sudah sering dibahas oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian yang dapat dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pentingnya kerja sama di masa Pandemi Covid-19 dijelaskan dalam penelitian berjudul *“Challenges for the Brazilian State from the COVID-19 pandemic: the case of paradiplomacy in the state of Maranhão”*, yang ditulis oleh Alexandre Andrade Alvarenga, Erika Maria Sampaio Rocha, Jonathan Filippon, dan Maria Angélica Carvalho Andrade (2020). Pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang signifikan bagi Brazil. Pada tahun 2020, ketika pasokan alat medis langka, Negara Bagian Maranhão, Brazil berhasil mendatangkan ventilator dari China melalui paradiplomasi. Mereka menghadapi tantangan logistik dan birokrasi, namun berhasil mengatasi krisis ini. Kasus ini menunjukkan kemampuan pemerintah sub-nasional⁶ untuk bertindak mandiri dalam urusan internasional dan menyoroti peran penting mereka dalam mengatasi krisis global.

⁶ Mengacu pada tingkat pemerintahan yang beroperasi di bawah pemerintah pusat dalam suatu negara. Pemerintahan ini mengelola urusan lokal dan mengelola wilayah atau teritori atas nama pemerintah nasional

Dalam penelitian “*The Global Role of Cities Government on Tackling Covid-19*” oleh Dyah Estu Kurniawati, Eko Priyo Purnomo, Ali Roziqin, dan Rizka Zahrotun Khairina (2022) menjelaskan bahwa pemerintah sub-nasional seperti pemerintah daerah/kota memiliki peran penting dalam penanggulangan Covid-19. Pemerintah kota harus mencari solusi sendiri karena pemerintah pusat kurang efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kota-kota di dunia menggunakan diplomasi luar negeri, seperti koneksi *Sister City*, *Global City Networking*⁷, dan kerja sama dengan organisasi regional serta *Non-Governmental Organization* (NGO) internasional untuk mendapatkan peralatan medis, dukungan moral, berbagi pengalaman, dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas antar daerah/kota melalui paradiplomasi terbukti efektif dalam penanganan Covid-19 karena komunikasi yang efisien. Pemerintah daerah/kota merespons lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat karena kebijakan pusat yang lamban, ketegangan diplomatik antar negara, dan keraguan terhadap kredibilitas WHO.

Kegagalan paradiplomasi di masa pandemi Covid-19 dijelaskan melalui penelitian berjudul “*The City of Harare’s response to COVID-19: A case for international co-operation and solidarity*” yang ditulis oleh Enock Ndawana (2022). Kota Harare merupakan ibu kota negara Zimbabwe dan sama seperti kota-kota di seluruh dunia Kota Harare juga menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 di wilayahnya. Meskipun Harare telah bekerja sama dengan kota-kota seperti

⁷ Keterhubungan dan kolaborasi antar kota yang berfungsi untuk mewadahi pemerintah kota dalam jaringan ekonomi global

Munich dan Guangzhou untuk memperoleh bantuan medis, kasus Covid-19 tetap tinggi. Menurut penulis Kota Harare seharusnya lebih proaktif dalam berdiskusi dan bertukar ide dengan Guangzhou serta tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah di Harare hanya menyalurkan arahan pusat daripada memimpin respons daerah sesuai kondisi lokal.

Pada penelitian berjudul “Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi Sichuan dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 di Jawa Barat” yang ditulis oleh Suhendrik, R.M.T. Nurhasan Affandi, dan Deasy Silvy Sari (2021) menjelaskan bagaimana peran kerja sama *Sister Province* dalam mengatasi kasus Covid-19. Pandemi Covid-19 dampak negatif dari bermacam aspek kehidupan sehingga Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menekankan diplomasi yang antisipatif dan adaptif, sesuai dengan resolusi resolusi *World Health Organization* (WHO) terkait inisiasi kesehatan/pandemi di Indonesia salah satunya adalah melakukan Kerja sama Internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi negara akibat pandemi Covid-19. Provinsi Jawa Barat, mengikuti fokus dari pemerintah Indonesia, melakukan kerja sama dengan Provinsi Sichuan melalui koneksi *Sister Province* Jawa Barat dan Sichuan. Melalui kerja sama ini Jawa Barat memperoleh bantuan kesehatan dan promosi perdagangan, meningkatkan pendapatan daerah untuk pemulihan pasca Covid-19.

Penelitian berjudul “Analisis Paradiplomasi Melalui Kerja sama *Sister Province* Antara Jawa Tengah - Fujian Di Bidang *Trade, Tourism, Investment* (TTI) Tahun 2015 – 2020” yang ditulis oleh Dila Aprilia Yuvanti (2022) membahas kerja sama Jawa Tengah dan Fujian sejak 1999, yang resmi dimulai pada 2009. Fokus

penelitian pada MoU II (2014-2019) mencakup ekspor-impor, pariwisata, dan investasi (TTI). Menggunakan Teori Neo-Liberalisme dan Paradiplomasi, penelitian menekankan peran penting aktor sub-nasional, seperti Sekretariat Daerah dan Dinas Provinsi Jawa Tengah, yang meningkatkan ketergantungan dengan Fujian. Hasilnya, kerja sama TTI meningkat dari tahun ke tahun selama 2015-2020.

Beberapa penelitian tersebut memiliki benang merah yakni untuk mengatasi masalah global seperti Pandemi Covid-19 diperlukan sebuah kerja sama. Selain pemerintah pusat, pemerintahan daerah dapat mengupayakan kerja sama internasional dalam bentuk paradiplomasi, contohnya seperti kerja sama Sister City maupun *Sister Province* untuk menanggulangi kasus Covid-19. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori dan konsep antara lain :

1.5.1.Liberalisme Interdependensi

Liberalisme Interdependensi merupakan salah satu aliran dalam paradigma Liberalisme. Gagasan Interdependensi sudah ada sejak abad ke-19 yang menyatakan oleh proses modernisasi yang mengakibatkan negara saat ini saling bergantung satu sama lain (Jørgensen, 2018). Barulah pada tahun 1977 Robert Keohane dan Joseph S. Nye memperkenalkan Liberalisme Interdependensi melalui buku yang berjudul "*Power and Interdependence*". Keohane & Nye (2012) membantah argumen realis yang menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya aktor penting dalam hubungan internasional serta kekuatan militer adalah alat utama untuk mencapai kepentingan nasional. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa politik global dibentuk oleh berbagai macam interaksi, seperti hubungan ekonomi, yang menciptakan ketergantungan antara negara dan aktor non-negara.

Hal ini disebut sebagai Interdependensi Kompleks. Keohane & Nye menyoroti bagaimana isu-isu seperti keamanan, perdagangan, dan komunikasi transnasional yang saling berhubungan, membentuk jaringan hubungan yang kompleks yang mempengaruhi perilaku dan pengambilan kebijakan suatu negara.

Perdagangan transnasional erat kaitannya dengan komunikasi transnasional. Artinya dengan adanya perdagangan mampu menjalin komunikasi aktor yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide, komunikasi ilmiah, dan pertukaran budaya. Hal ini dapat berkontribusi pada penyebaran reformasi politik dan ekonomi serta pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah bersama (Moravcsik, 1992). Liberalisme Interdependensi juga menggarisbawahi kerja sama internasional dan konflik internasional hidup berdampingan, membentuk dinamika hubungan global dalam berbagai aspek (Keohane & Nye, 2012).

Liberalisme Interdependensi memandang bahwa saling ketergantungan ekonomi antar negara akan mengurangi resiko terjadinya konflik internasional (Rosyidin, 2020). John M. Owen (2012) menyatakan dengan adanya Interdependensi akan menghasilkan kerja sama dan perdamaian. Hal ini terjadi karena negara-negara dengan ikatan ekonomi yang luas merasa terlalu mahal untuk berperang atau mengancam dengan kekerasan karena takut akan terjadinya perpecahan yang merugikan.

Di masa modern saat ini, tidak hanya pemerintah nasional saja yang aktif dalam kerja sama namun juga pemerintah daerah atau pemerintah sub-nasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintah sub-nasional untuk ikut serta dalam kerja sama internasional seperti kondisi global saling ketergantungan akibat

kemajuan teknologi dan komunikasi, isu transnasional yang tidak bisa ditangani sendiri oleh negara, peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah, dan harapan warga yang semakin tinggi pada pemerintah sub-nasional. (Cohn & Smith, 1996).

1.5.2. Paradiplomasi

Dalam paradiplomasi, pemerintah daerah terlibat dalam hubungan yang bermotif politik dengan aktor pemerintah atau non-pemerintah asing dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, budaya, politik, atau keuntungan lainnya. (Kuznetsov, 2014). Paradiplomasi merupakan suatu proses yang memungkinkan unit-unit sub-nasional, seperti pemerintah daerah, untuk melakukan hubungan diplomatik mereka sendiri dengan pemerintah negara lain atau pemerintahan daerah negara lain untuk mengejar kepentingan mereka sendiri (Chatterji & Saha, 2017).

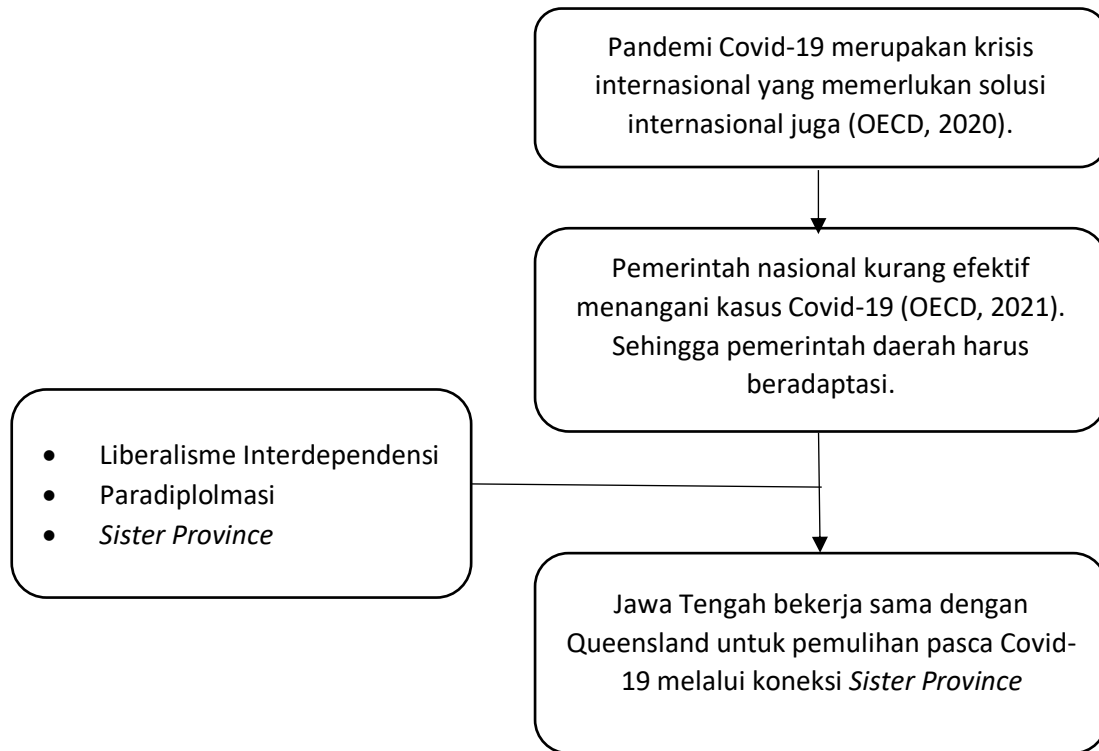
Kuznetsov (2014) mengambil contoh pentingnya paradiplomasi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh negara bagian Alberta, Kanada. Alberta melakukan kerja sama *Sister Province* dengan Lviv dan Ivano-Frankivsk yang berfokus dalam bidang agrikultur, budaya, dan pendidikan. Namun, kepentingan utama Alberta di kancah internasional adalah untuk mendorong kondisi yang lebih baik bagi pasar ekspor minyak dan gas dari Alberta. Pemerintah Alberta menyadari bahwa pemerintah pusat tidak mampu mewakili seluruh kepentingan Alberta di kancah internasional sehingga pemerintah Alberta mengambil beberapa inisiatif salah satunya dengan secara aktif mengirimkan delegasi regional untuk mengunjungi berbagai forum ekonomi internasional. Selain itu, Alberta juga membuka kantor internasional di beberapa negara seperti Amerika, Mexico, Inggris, China, Jepang dll. Paradiplomasi yang dilakukan oleh Alberta menyimpulkan bahwa ketika

pemerintah pusat dirasa kurang berkontribusi pemerintah daerah dapat mencari peluang untuk mengamankan kepentingan daerah di kancah internasional.

1.5.3. Sister Province

Istilah *Sister Province* mengacu pada hubungan antara dua daerah dalam satu negara dengan daerah di negara lain. Hubungan ini melibatkan perjanjian formal atau informal untuk mendorong kerja sama, pertukaran budaya, dan saling mendukung antar satu sama lain. *Sister Province* bertujuan untuk memupuk pemahaman, kolaborasi, persahabatan, meningkatkan ikatan sosial dan budaya, serta pertumbuhan ekonomi (Sister City International, 2020). Rodrigues & Mattioli (2017) memandang bahwa hubungan antar kota atau daerah memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan internasional, karena jaringan kota atau daerah saat ini memiliki dampak besar terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan banyak isu lokal maupun regional lainnya.

Beberapa daerah di Indonesia telah melakukan kerja sama *Sister Province* salah satunya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Tujuan dari kerja sama tersebut salah satunya adalah ingin melakukan program pemberdayaan desa di Provinsi DIY dengan mencontoh program *Saemaul Undong* atau program Desa Baru (Rosyada, 2022). Melalui program pemberdayaan desa, beberapa desa di Provinsi DIY berhasil memiliki produk unggulan tersendiri yaitu program penggemukan sapi di Kampung Ngawen dan program penghasil gula semut di Desa Triharjo (Dewi, 2020).

Bagan 1.1**Bagan Alur Pemikiran Penelitian**

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Berdasarkan definisi para ahli di bagian kerangka pemikiran, maka dirumuskan definisi konseptual sebagai berikut :

1.6.1.1. Liberalisme Interdependensi

Penelitian ini menggunakan definisi dari Keohane & Nye (2012) serta Moravcsik (1992) untuk mencari kaitan antara Interdependensi Kompleks Jawa Tengah dan Queensland dengan kerja sama dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

1.6.1.2. Paradiplomasi

Penelitian ini menggunakan definisi paradiplomasi dari Cohn & Smith (Cohn & Smith, 1996) dan Kuznetsov (2014) karena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Pada penelitian ini munculnya krisis global seperti Pandemi Covid-19 serta kurangnya peran Pemerintah Pusat mengharuskan Jawa Tengah bekerja sama dengan Queensland untuk memulihkan kondisi ekonomi & kesehatan pasca Pandemi Covid-19.

1.6.1.3. *Sister Province*

Penelitian ini memandang *Sister Province* seperti definisi dari Sister City International (2020) dan Rodrigues & Mattioli (2017) karena pada kasus ini kerja sama Jawa Tengah dan Queensland menggunakan koneksi *Sister Province* memainkan peran yang penting dalam memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan di masyarakat Jawa Tengah.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Liberalisme Institusional

Penelitian ini menggunakan paradigma Liberalisme Interdependensi untuk menjelaskan penanganan krisis internasional seperti Pandemi Covid-19 melalui kerja sama. Maka dari itu beberapa aspek yang diteliti yaitu:

- 1) Sejarah hubungan Jawa Tengah dan Queensland
- 2) Interdependensi Kompleks antara Jawa Tengah dan Queensland

1.6.2.2. Paradiplomasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep paradiplomasi untuk menjelaskan proses kerja sama Jawa Tengah dan Queensland. Maka dari itu beberapa aspek yang diteliti adalah :

- 1) Dinamika hubungan antara Jawa Tengah dan Queensland
- 2) Kolaborasi dan komunikasi antara Jawa Tengah dan Queensland

1.6.2.3. Sister Province

Penelitian ini menggunakan konsep *Sister Province* untuk melihat dinamika kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland. Oleh karena itu beberapa aspek yang diteliti adalah :

- 1) Program yang dilakukan Jawa Tengah dan Queensland dalam rangka pemulihan pasca Covid-19
- 2) Capaian program yang dilakukan oleh Jawa Tengah dengan Queensland

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, argumen penelitian ini adalah dengan eratnya hubungan Jawa Tengah dan Queensland melalui koneksi *Sister Province*, kerja sama antara Jawa Tengah dan Queensland dalam pemulihan pasca Pandemi Covid-19 dapat terwujud.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada analisis dan menggali lebih jauh tentang pentingnya sebuah fenomena. Sebagaimana penelitian kualitatif, gejala sosial, perilaku, sejarah, sering kali diteliti dalam penelitian kualitatif, yang mengandalkan pengetahuan subjektif yang didukung oleh fakta dan realitas lapangan. (Creswell & Poth, 2018). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena dengan mendeskripsikannya secara rinci, sebagaimana yang terjadi di area penelitian, untuk melukiskan gambaran keadaan fenomena tersebut. (Nugrahani, 2014).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan mendalam mengenai sebuah fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan observasi ketat atau metode wawancara untuk mendokumentasikan bagaimana suatu hal dapat terjadi sehubungan dengan fenomena sosial yang diselidiki (Leavy, 2017). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana *Sister Province* dapat mewadahi Jawa Tengah dan Queensland untuk bekerja sama dalam rangka pemulihan pasca Pandemi Covid-19.

1.8.2. Situs Penelitian

Istilah situs penelitian mengacu pada lokasi fisik di mana suatu benda dipelajari untuk mengumpulkan data atau mengamati kondisinya saat ini. (Sutri, 2019). Peneliti akan melakukan penelitian dan memperoleh data-data pada kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3. Subjek Penelitian

Orang, benda, atau makhluk hidup dapat dianggap sebagai subjek penelitian jika mereka dapat memberikan data yang berguna untuk studi ilmiah. (Idrus, 2009). Dalam Penelitian ini subjeknya merupakan aktor yang terlibat dalam *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland yakni Biro Pematda Provinsi Jawa Tengah dan Pihak dari Queensland, serta beberapa dinas terkait

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan dari pengamatan langsung dikenal sebagai data primer, dan data yang diambil dari sumber yang sudah ada sebelumnya dikenal sebagai data sekunder. (Nurdin & Hartati, 2019). Dalam penelitian ini, data-data tersebut meliputi wawancara langsung dengan narasumber serta pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Queensland yang diunggah melalui situs resmi pemerintah seperti: arsip, pernyataan pejabat pemerintah, dan Undang-undang.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data adalah asal-muasal dari data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah (Cahyania, 2018). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pernyataan narasumber secara langsung yakni dengan Ibu Eka Agustine Wynarningsih selaku kepala sub-bagian kerja sama luar negeri Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja sama (Pemotdaks) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen, jurnal, artikel, dan kutipan pernyataan yang berkaitan dengan *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland seperti dokumen yang berasal dari website resmi pemerintah Jawa Tengah dan website dari Trade Investment Queensland (TIQ) & Departement of Foreign Affair and Trade (DFAT) serta pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan CEO TIQ, Benjamin Giles.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data (Gill et al., 2008). Penulis mengumpulkan informasi dengan menggunakan studi dokumen dan metode wawancara. Sebuah diskusi di mana dua orang mendiskusikan suatu topik tertentu melalui sesi tanya jawab untuk menjelaskan maknanya dikenal sebagai wawancara. (Wahyuni, 2022). Sedangkan Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan berbagai jenis dokumen untuk membantu mengumpulkan data dan fakta sebagai bahan analisis (Teniwut, 2022). Data penelitian ini dikumpulkan melalui

wawancara dengan narasumber serta mengumpulkan dokumen-dokumen penting terkait *Sister Province* Jawa Tengah dan Queensland berupa berita, artikel, notulensi, dan peraturan perundang-undangan.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data kongruen untuk memeriksa data. Dengan menggunakan pendekatan analisis data kongruen, peneliti dapat menggunakan contoh spesifik untuk menghasilkan atau mereplikasi pernyataan dan meramalkan hasil dari suatu keadaan. Saat melakukan penelitian, metode kongruen digunakan untuk memastikan apakah masalah penelitian, pertanyaan, metodologi, dan pendekatan pengolahan data sesuai satu sama lain (Morse & Richards, 2012). Secara sederhana, metode kongruen digunakan peneliti untuk mencocokkan antara teori dan data sebenarnya di lapangan. Karakteristik penting dari metode kongruen adalah bahwa peneliti memulai dengan teori dan kemudian mencoba untuk menilai kemampuannya untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dalam kasus tertentu (George & Bennett, 2005).

